

C. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Angraini, Titi dkk. (2011). *Menata Kembali Pengaturan Pemilukada*. Jakarta: Perludem.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- _____, (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press. Cetakan ke-2.
- _____, (2010). *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly & M. Ali Safaat. (2006). *Konsep Hukum Dinamis. Di Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Chaidir, Ellydar & Sudi Fahmi. (2010). *Hukum Perbandingan Konstitusi*. Yogyakarta: Total Media.
- Chand, Hari. (1994). *Modern Jurisprudence*. International Law Book Services. Kuala Lumpur.
- Gaffar, Janedri M. (2012). *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konpress.
- Hasani, Ismail & Prof. Dr. A. Gani Abdullah SH. (2006). *Pengantar Ilmu Perundang-undangan*. Jakarta: FSH UIN Syarif Hidayatullah.
- Hermanto, Achmad Dodi. (2012). *Demokrasi Lokal, Evaluasi Pemilukada di Indonesia*. Jakarta: KONpress.
- Huda, Ni'matul. (2007). *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: UII Press.
- Kelsen, Hans. Terjemahan oleh Somardi. (1995). *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif*. Jakarta: Rimdi Pers.
- Kriyantono, Rachmat. (2006). *Riset komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Manan, Bagir. (2012). *Membedah UUD 1945*. Malang: UB Press.

- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet.1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ranggawidjaja, H. Rosjidi. (1998). *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indoneisa*. Bandung: PT. Mandar Maju.
- Rifai, Anam dkk. (2010). *Partai Politik Demokrasi dan Kebijakan Publik*. Malang: Averroes Press.
- Rifai, Prof. Amzullian. (1998). *Pemilihan Umum Di Australia*. Palembang: Unsri
- Soekanto, Soerjono & Purnadi Purbacaraka. (1993). *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soemantri, Sri. (1997). *Hak Uji Material Di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. (1990). *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. (2010). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Stroink, F.A.M. dalam Abdul Rasyid Thalib. (2006). *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Syafiie, Inu Kencana. (2005). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Triwulan, Titik T. dan H. Ismu Gunadi Widodo. (2003). *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wall, Alan dkk. (2006). *Electoral Management Design: The International IDEA Hand Book*. Swedia: International IDEA.
- Wingjosoebroto, Soetandyo. (2002). *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Huma dan Elsam.

2. Jurnal

- Ahmadi. (2015). *Analisis Konstruksi Hukum Konstitusionalitas Pemilu Serentak Pada Tahun 2019*. Jurnal Al-‘Adl. Vol. 8 No. 1.
- Astomo, Putera. (2014). *Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum Dengan Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum*. Semarang: Yustisia Edisi 90.
- Chen, Albert. H.Y. (2000). *The Interpretation of the Basic Law-Common Law and Mainland Chinese Perspectives*. Hong Kong: Hong Kong Journal Ltd.
- Dewi, Dyah Adriantini Sintha. (2009). *Fenomena Golput Dalam Pemilu*. Jurnal Konstitusi. Vol. II. No. 1. PK2P-FH. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Ibrahim, Anis. (2009). *Lembaga Penyelenggara Pemilu Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*. Jurnal Hukum “ARGUMENTUM” Volume 8 Nomor 2.
- Jati, Rahendro. (2012). *Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif*. Jurnal Rechtsvinding. Media Pembinaan Hukum Nasional. Volume 1. Nomor 3.
- Khazanah. (2014). *Hans Kelsen*. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 1. No. 1.
- Marzuki, Prof. Dr. HM. Laica, S.H. (2009). *Kesadaran Berkonstitusi Dalam Kaitan Konstitusionalisme*. Jurnal Konstitusi. Volume 6. Nomor 3.
- Masyrofah. (2013). *Arah Perubahan Sistem Pemilu Dalam Undang-Undang Politik Pasca Reformasi (Usulan Perubahan Sistem Pemilu Dalam Undang-Undang Politik Pasca Reformasi)*. Jurnal Cita Hukum. Vol. I No. 2.
- Mochtar, Zainal Arifin dan Iwan Satriawan. (2009). *Efektivitas Sistem Penyelesaian Pejabat Komisi Negara di Indonesia*. Jurnal Konstitusi Volume 6 Nomor 3. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK.

- Nazriyah, R. (2011). *Kemandirian Penyelenggara Pemilihan Umum (Kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-IX/2011)*. Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011.
- Nurjтахjo, Hendra. (2005). *Lembaga, Badan, Dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) Di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Tahun ke-35. Nomor 3.
- Sadikin, Usep Hasan. (2016). *Menyerentakan Pemilu, Memusatkan Anggaran Pilkada*. Jurnal Pemilu & Demokrasi. Perludem 8.
- Saifudin. (2009). *Proses Pembentukan UU: Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan UU*. Yogyakarta: Jurnal Hukum. No. Edisi Khusus 16 Oktober 2009.
- Sarbaini, SH. MH. (2015). *Demokratisasi Dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum*. Jurnal Inovatif. Volume VIII Nomor I.
- Sukmariningsih, Retno Mawarni. (2004). *Penataan Lembaga Negara Mandiri Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Mimbar Hukum. Volume 26. Nomor 2.
- Sugihariyadi, Moh. dan Joni Rahardjo. (2015). *Menakar Profesionalisme Penyelenggaraan Pemilu 2014 Di Kota Garam: Analisis Kepemimpinan, Integritas, Independensi, Dan Kompetensi Kepemiluan*. ADDIN. Vol. 9. No. 1.
- Sukriono, Didik. (2009). *Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jurnal Konstitusi Volume II Nomor 1. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK.
- Tordoff, William. (1994). "Decentralisation: Comparative Experience in Commonwealth Africa". The Journal of Modern African Studies. December. 32:4.
- Wandasari, Shandra Lisya. (2013). *Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mewujudkan Pengurangan Risiko Bencana*. Semarang: Unnes Law Journal 2 (2).

3. Makalah/Skripsi/Tesis/Desertasi

Asshiddiqie, Jimly. (2003). *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*. Denpasar 14-18 Juli 2003: Makalah dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII.

Brouwer, J.G. dan Schilder. (1998). *A Survey of Dutch Administrative Law*. Nijmegen: Ars Aequilibrari.

Hadjon, Philipus M. *Tentang Wewenang*. Makalah. Surabaya: Universitas Airlangga.

Irawan, Oktino Setyo. (2011). *Analisis Kedudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sebagai Lembaga Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 1 No. 2.

Jayus. (2013). *Rekonseptualisasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Indonesia*. Malang: Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya.

Mujiyana. (2009). *Makna Kemandirian Komisi Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum*. Jurnal Konstitusi. Vol. II. No. 1.

Risdiana, Lan Lan. (2012). *Teori Positivisme Dan Teori Hukum Murni*. Cianjur: Makalah Universitas Suryakencana.

Ulum, Muhammad Bahrul dan Dizar Al Farizi. (2009). *Implementasi dan Implikasi Putusan MK Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia*. Jurnal Konstitusi. Volume 6. Nomor 3.
4. Modul/Laporan

Centre for Law and Democracy and The Asia Foundation. (2012). *Komisi Pemilihan Umum dan Penyediaan Informasi: Studi Banding Mengenai Praktek Global yang Lebih Baik*. Jakarta: Creative Commons Attribution-Noncommercial

Sikumbang, Sony Maulana, S.H., M.H., Fitriani Ahlan Sjarif, S.H., M.H., M. Yahdi Salampessy, S.H, M.H. *Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*. Di Tinjauan Umum Pembentukan Norma Hukum. Modul 1.
5. Ensiklopedia

Encyclopedia of Public International Law. (1987). North-Holland.

6. Laman Web

Aulianshah, Kiagus. (2016). *Hentikan intervensi DPR ke KPU*.

<https://beritagar.id/artikel/editorial/hentikan-intervensi-dpr-ke-kpu>.

Diakses pada tanggal 3 September 2016.

Faiz, Pan Mohamad. (2009). *Ketidaktercemerlangan UU Pemilu Legislatif*.

<http://jurnalhukum.blogspot.co.id/2009/03/ketidaktercemerlangan-uu-pemilu-legislatif.html>. Diakses pada tanggal 19 September 2016.

Forum Mahasiswa Konstitusi. (2010). *Merekonstruksi Independensi KPU*.

<http://formassive.blogspot.co.id/2010/07/merekonstruksi-independensi-kpu.html>.

Diakses pada 26 September 2016.

Makalah Plus. *Latar Belakang Dan Dasar Pemikiran Tujuan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

<http://makalahplus.blogspot.co.id/2013/12/Dasar-pemikiran-dan-tujuan-Perubahan-undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945.html>. Diakses pada tanggal 20

Oktober 2016.

Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara. (2016). (Hans Kelsen: *General Theory Of Law And State*).

<http://poltekkestasiklekturer.blogspot.co.id/2016/03/teori-umum-tentang-hukum-dan-negara.html>. Diakses pada tanggal 26

September 2016.

7. Majalah/Koran

Asshiddiqie, Jimly. (2008). Dalam Denny Indrayana. *Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Ketatanegaraan*. Jakarta: Kompas.

8. Peraturan Perundang-undangan

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dan Perkara Pengujian Undang-Undang.

Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.